



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN STASIUN KIPM KENDARI

TAHUN 2025



STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN KENDARI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kendari, 23 Februari 2026

Plt. Kepala,



Kasrida

NIP:197705122002122001

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran dan Daftar	52



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI**

JALAN RAYA BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, KENDARI PARIAMAN 25586

TELEPON (0751) 819109, 819090, FAKSIMILE (0751) 819109

LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.Kendari@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan [Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari](#) Tahunan Tahun 2025 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 September 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kendari, 23 Februari 2026

Plt. Kepala,



Kasrida

NIP:197705122002122001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satkerl ingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode berakhir 31 Desember 2025. adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp10.109.978.-** atau mencapai **5.24 persen** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp192.850.000.-**.

Realisasi Belanja Negara untuk periode berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp6.745.706.450.-** atau mencapai **51.14 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp7.113.219.000.-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp9.059.701.600.-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp95.173.727.-**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp8.964.527.873.-**,

Nilai Kewajiban tersaji sebesar **Rp13.057.415.-** yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek . Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar **Rp9.046.644.185.-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp9.073.980.-**. Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp7.311.021.508.-**, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp(7.301.947.528.-)**. Kegiatan non operasional defisit sebesar **Rp(3.402.324)** sehingga entitas mengalami Defisit–LO sebesar **Rp(7.305.349.852.-)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2025** adalah sebesar **Rp8.723.021.432.-** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(7.305.349.852.-)** kemudian ditambah dengan koreksi lain - lain TA 2024 senilai **Rp1.080.-** dan ditambah transaksi antar entitas sebesar **Rp7.628.971.525.-** kenaikan/penurunan ekuitas **Rp323.622.753.-** sehingga ekuitas akhir pada Tanggal **31 Desember 2025** adalah senilai **Rp9.046.644.185.-**.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Kendari, 23 Februari 2026

Plt. Kepala,



Kasrida

NIP. 19770512 200212 2 001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KIPM KENDARI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Anggaran	REALISASI TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	192,850,000	10,109,978	5.24	144,125,384
Jumlah Pendapatan		192,850,000	10,109,978	5.24	144,125,384
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4,296,511,000	4,183,685,126	97.37	1,847,858,130
Belanja Barang	B.4	2,816,708,000	2,562,021,324	90.96	1,025,790,199
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		7,113,219,000	6,745,706,450	94.83	2,873,648,329

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN KIPM KENDARI NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	192,709	215,998
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	(1,080)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	192,709	214,918
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.10	94,982,936	1,110,154,590
Jumlah Aset Lancar		95,175,645	1,110,369,508
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2,822,032,000	2,658,822,000
Peralatan dan Mesin	C.15	9,340,691,116	5,143,827,672
Gedung dan Bangunan	C.16	6,929,545,661	6,548,638,877
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	233,705,900	233,705,900
Aset Tetap Lainnya	C.18	41,785,000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(10,403,231,804)	(5,948,315,611)
Jumlah Aset Tetap		8,964,527,873	8,636,678,838
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		9,059,703,518	9,747,048,346
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	13,057,415	24,026,914
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum diTagihkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13,057,415	24,026,914
JUMLAH KEWAJIBAN		13,057,415	24,026,914
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	9,046,646,103	8,723,021,432
JUMLAH EKUITAS		9,046,646,103	8,723,021,432
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9,059,703,518	8,747,048,346

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM KENDARI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9,073,980	155,273,980
JUMLAH PENDAPATAN		9,073,980	155,273,980
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,183,493,376	2,383,427,364
Beban Persediaan	D.3	179,215,058	184,991,869
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,520,699,006	1,003,184,836
Beban Pemeliharaan	D.5	838,838,070	544,501,639
Beban Perjalanan Dinas	D.6	117,882,284	383,383,442
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	470,892,755	552,801,714
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	959	1,080
JUMLAH BEBAN		7,311,021,508	5,052,291,944
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,301,947,528)	(4,896,717,964)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		820,000	(27,444,306)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		820,000	24,655,300
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	52,099,606
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya		(4,222,324)	6,652,384
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	6,652,384
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Oprasional		(3,402,324)	(20,791,922)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,305,349,852)	(4,917,509,886)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,305,349,852)	(4,917,509,886)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KIPM KENDARI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	8,723,021,432	10,349,819,906
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,305,349,852)	(4,917,809,886)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1,080	3,946
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	1,080	3,946
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7,628,971,525	3,291,007,466
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	323,622,753	1,626,798,474
EKUITAS AKHIR	E.5	9,046,644,185	8,723,021,432

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan Kebijakan
Teknis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan PERMENKP 48 PERMENKP Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 82 A Kendari -, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendarimempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendaridiharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendarididirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, dan perubahan organisasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Kendariberkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari yang kompeten dan profesional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari ;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari ;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari secara optimal.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satkerlingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari dan Bau-Bau Per 31 Desember ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun KIPM Kendari . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Kendaridan Bau-Bau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Kendaridan Bau-Bau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun KIPM Kendari. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Kendari adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	100%

	Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja

yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Kendari telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal Satuan kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya Refocussing, penhematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Revisi DIPA Selama Periode 31 Desember 2025 :

No	Uraian	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1	Data Awal	2 Desember 2024	DIPA Awal-
2	Revisi Ke-1	15 Januari 2024	Revisi Relokasi Anggaran
3	Revisi Ke-2	16 April 2025	Revisi Relokasi Anggaran Tahap II
4	Revisi Ke-3	15 Juli 2025	Revisi POK Halaman III DIPA
5	Revisi ke 4	8 September 2025	Revisi
6	Revisi ke 5	8 September 2025	Revisi POK
7	Revisi ke 6	18 November 2025	Revisi buka blokir
8	Revisi ke 7	11 Desember 2025	Revisi DJA

Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	192,850,000	192,850,000
Pendapatan lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	192,850,000	192,850,000
Belanja		
Belanja Pegawai	4,483,494,000	4,296,511,000
Belanja Barang	3,719,745,000	2,816,708,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	8,203,239,000	7,113,219,000

Realisasi Pendapatan

Rp10.109.978.-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Stasiun KIPM Kendari selama Periode 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp10.109.978.- dan Rp186.581.664.- atau mencapai 5.24 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp192.850.000.-. Realisasi penerimaan pendapatan Stasiun KIPM Kendari merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Per 31 Desember Tahun 2025

Jenis Pendapatan	2025		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	298,980	-
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	192,850,000	8,775,000	4.55
Pendapatan Penjualan Peralatan	-	820,000	-
Penerimaan Kembali TAYL	-	215,998	-
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Jumlah	192,850,000	10,109,978	5.24

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp176.471.686.- atau (1745.52) persen. Hal ini sebakn oleh menurunnya aktivitas pengujian dan sertifikasi pada Stasiun KIPM Kendaridan Pendapatan Penjualan/Pelepasan aset . Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2 berikut:Perbandingan Realisasi PNBPN TA. 2025 dan 2024

URAIAN JENIS PNBP	REALISASI PNBP (Rp)		NAIK (TURUN)	
	2025	2024	Jumlah	%
Pendapatan Dari Penjualan BMN	820,000	24,655,300	(23,835,300)	-2907
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL	215,998	6,652,384	(6,436,386)	-2979.84
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	8,775,000	154,675,000	(145,900,000)	-1662.68
pendapatan penggunaan sewa bangunan sesuai Tusi	298,980	298,980	-	0.00
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	300,000	(300,000)	0.00
Jumlah	10,109,978	186,581,664	(176,471,686)	-1745.52

Terdapat perbedaan Realisasi Pendapatan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional karena Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi sebesar Rp9.073.980,- sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi sebesar Rp8.775.000, Pendapatan dari penjualan BMN sebesar Rp820.000, Pendapatan Pengembalian belanja TAYL sebesar Rp215.998,- dan pendapatan penggunaan sewa bangunan sesuai tusi sebesar Rp. 298980

ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA
Pada Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP LO :		9,073,980
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
2	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	298,980
3	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	8,775,000
4	425332 Pendapatan Jasa Karantina Ikan	-
5	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-
6	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
7	425999 Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-
8	425332 Pengembalian Pendapatan Jasa Karantina Ikan	-
Pendapatan PNBP LRA :		10,109,978
PIUTANG PNBP 2025 (NERACA)		-
PIUTANG PNBP 2024 (NERACA)		-
Selisih :		(1,035,998)
Klarifikasi Selisih:		
1	425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
2	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	820,000
2	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-
3	425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-
4	425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-
5	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-
6	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	215,998
7	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-
8	391119 Koreksi lainnya	-
Klarifikasi Selisih PNBP		1,035,998

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 1.745% dari realisasi pnbp

Realisasi Belanja Negara
Rp6.745.706.450.-

B.2 Belanja Negara

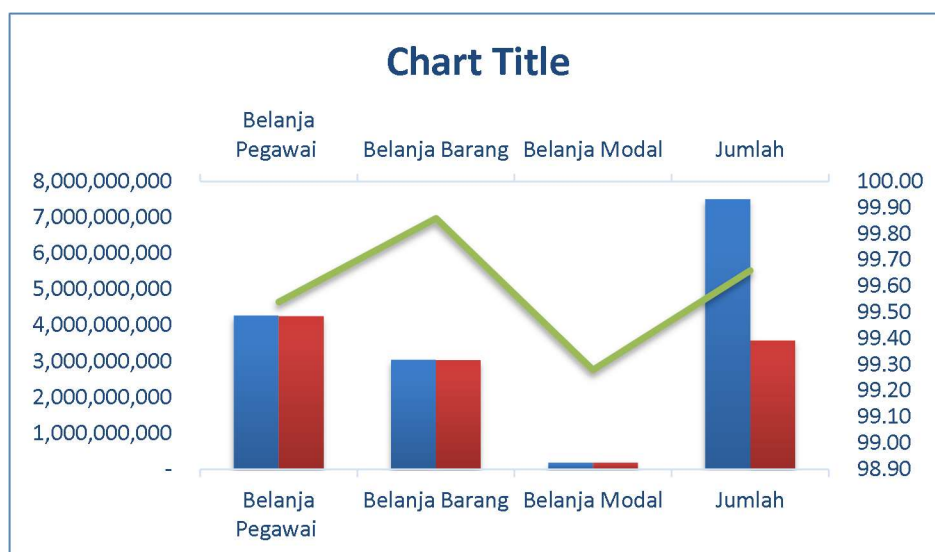
Realisasi Belanja Negara Stasiun KIPM Kendari selama Per 31 Desember tahun 2025 setelah dikurangi pengembalian adalah sebesar Rp6.745.706.45000 atau 97.22 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.113.219.000.- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4,296,511,000	4,183,685,128	97.37
Belanja Barang	2,816,708,000	2,562,021,324	90.96
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	7,113,219,000	6,745,706,452	94.83

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar 54.76 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berpindahnya alokasi anggaran belanja SKIPM Bau-Bau ke SKIPM Kendari

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	REALISASI NETTO (Rp)		NAIK/ TURUN	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	4,183,685,126	2,382,853,978	1,800,831,148	75.57
Belanja Barang	2,562,021,324	1,975,937,898	586,083,426	29.66
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	6,745,706,450	4,358,791,876	2,386,914,574	54.76

Belanja Pegawai
Rp4.183.685.126.-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun KIPM Kendari per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.183.685.126.- dan Rp2.382.853.978.- atau 96.48 persen Rincian anggar dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai Tahun 2025 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Beban Pegawai		
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)
Beban Gaji Pokok PNS	1,223,929,840	834,766,300	46.619
Beban Pembulatan Gaji PNS	16,328	10491	55.638
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	103,492,650	72,818,760	42.124
Beban Tunj. Anak PNS	34,277,164	25,925,632	32.213
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	11,160,000	58.065
Beban Tunj. Fungsional PNS	22,300,000	52,585,000	(57.592)
Beban Tunj. PPh PNS	9,167,494	5,758,756	59.192
Beban Tunj. Beras PNS	73,361,460	53,590,800	36.892
Beban Uang Makan PNS	179,066,000	106,778,000	67.699
Beban Tunjangan Umum PNS	40,890,000	6,855,000	496.499
Beban Gaji Pokok PPPK	224,523,200	38,443,200	484.039
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,499	830	321.566
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,304,240	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	4,578,790	-	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	-	-	-
Beban Tunj. Beras PPPK	13,759,000	869,040	1,483.241
Beban Uang Makan PPPK	51,567,000	6,179,000	734.553
Beban Belanja Tunjangan Umum PPPK	16,390,000	-	-
Beban Uang Lembur	117,630,000	100,218,000	17.374
Beban Uang Lembur PPPK	23,745,800	5,300,000	348.034
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,711,555,587	1,010,953,138	69.301
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPI	303,487,074	50,372,031	502.491
Total Beban Pegawai	4,183,685,126	2,382,583,978	75.594

Apabila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.267.208.951.- atau 779.72 persen karena penganggaran SKIPM Bau-bau beralih menjadi penganggaran SKIPM Kendari. Perbandingan realisasi belanja pegawai Stasiun Karantina Ikan Kendari pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 dan TA. 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		NAIK (TURUN)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,704,140,936	1,170,518,739	533,622,197	45.59
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	323,126,529	45,492,070	277,634,459	610.29
Belanja Lembur	141,375,000	105,518,000	35,857,000	33.98
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	2,015,042,661	1,061,325,169	953,717,492	89.86
Jumlah Belanja	4,183,685,126	2,382,853,978	1,267,208,951	779.72

Pada Laporan Operasional realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp4.182.918.126.-.

Belanja Barang

Rp2.562.021.324.-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Stasiun KIPM Kendari per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.562.021.324.- dan Rp.2.382.853.978.-. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan anggaran belanja SKIPM Bau bau menjadi anggaran belanja SKIPM Kendari

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2024 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7

Rincian anggran Belanja Barang Tahun 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	911,542,000	891,623,535	97.81
Belanja Barang Non Operasional	46,628,000	36,692,500	78.69
Belanja Jasa	606,420,000	603,352,470	99.49
Belanja Pemeliharaan	73,333,000	731,805,684	997.92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	337,684,000	117,882,284	34.91
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	181,101,000	180,664,851	99.76
Jumlah Belanja	2,156,708,000	2,562,021,324	118.79

Apabila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2025 terdapat kenaikan

sebesar Rp1.239.635.376.- atau 59.20 persen karena pagu anggaran 2025 mengalami kenaikan dibanding pagu anggaran TA. 2024. Perbandingan realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	TA. 2025	TA. 2024	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	891,623,535	486,869,693	404,753,842	83.13
Belanja Barang Non Operasional	36,692,500	102,860,000	(66,167,500)	(64.33)
Belanja Jasa	603,352,470	411,827,545	376,952,240	91.53
Belanja Pemeliharaan	731,805,684	458,643,769	384,911,402	83.92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	117,882,284	383,383,442	645,838,772	168.46
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	180,664,851	132,353,449	48,311,402	36.50
Jumlah Belanja	2,562,021,324	1,975,937,898	1,794,600,158	90.82

Belanja Modal Rp0.-

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0.- dan Rp.0.-. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian belanja anggaran dan realisasi belanja modal disajikan pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	86.26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Realisasi Belanja Modal Stasiun KIPM Kendari pada 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi dibandingkan dengan anggaran tahun 2024

Perbandingan belanja modal Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat disajikan pada

tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	TA. 2025	TA. 2024	Jumlah	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0	(100.00)

Belanja Modal Tanah
Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp.0.-. Realisasi belanja modal tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	Naik/ Turun	
			Jumlah	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0		0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0		0.00
Pengurusan Tanah	0	0		0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0		0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0		0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0		0.00
Jumlah Belanja	0	0	0	0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp.0,-. Rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 disajikan dalam tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik (Turun)	
	2025	2024	Jumlah	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	-	0
Alat Kantor	0	0	-	0
Alat Rumah Tangga	0	0	-	0
Alat Studio	0	0	-	0
Alat Komunikasi	0	0	-	0
Peralatan Pemancar	0	0	-	0
Unit Alat Laboratorium	0	0	-	100
Alat Laboratorium Fisika/Elektronika	0	0	-	0
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	0	0	-	0
Alat Pengolahan	0	0	-	0
Komputer Unit	0	0	-	0
Peralatan Komputer	0	0	-	0
Peralatan Proses/Produksi	0	0	-	0
Peralatan Keselamatan Kerja	0	0	-	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-	100
Pengembalian	0	0	-	0
Jumlah Belanja Bersih	0	0	-	100

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan juga tidak terdapat realisasi belanja modal Gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, karena tidak adanya pagu anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan. Perbandingan belanja Gedung bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2024 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik/ Turun	
	2025	2024	Jumlah	%
Gedung Tempat Kerja	0	0	0	-
Belanja Modal BLU	0	0	0	-
Tugu/ Tanda Batas	0	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	0	-

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Tidak ada realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik/ Turun	
	2025	2024	Jumlah	%
Belanja Modal Jaringan, Pemasangan Tambah Dava Listrik	0	0	0	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal				
Jumlah Belanja	0	0	0	-

Belanja Modal Lainnya
Rp0,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya selama 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Periode 31 Desember 2025 ini.

Belanja Bantuan Sosial
Rp0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial selama 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp95.175.645.-

C.1 Aset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp95.175.645.- dan Rp110.369.508.-. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Piutang bukan pajak	958,750	215,998
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	(1,080)
4	Persediaan	94,982,936	110,154,590
5	Persediaan belum diregister	-	-
Jumlah		95,941,686	110,369,508

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0.-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Tabel 14

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	Keterangan	30 September 2025
1	Uang di Rekening Bank	-
2	Saldo UP (Uang tunai di brankas bendahara)	-
3	Kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan	-
Jumlah		-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0.-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0.- dan Rp0.-. Hal ini disebabkan oleh PNBP langsung disetorkan ke kas negara melalui transaksi EDC(Electronic Data Capture), jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening BRI	-	-

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp0.-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dan Hibah yang Belum di Sahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP

Rp191.750.-

B. C.1.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.191.750.- dan Rp215.998.-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang PNB Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNB(Pengembalian Tukin)	191,750	-
Piutang Lainnya	-	215,998
Jumlah	191,750	215,998

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0.-*

C.C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TPR Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp0.-

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TPA Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Urain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
Jumlah		-	-

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang Bukan
Pajak Rp(959.-)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar R(959.-) dan Rp(1.080.-). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar Per 31 Desember
2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	%Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak		-	-
Lancar	0	0.50%	-
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	0	-	-

*Belanja Dibayar di Muka
Rp0.00*

C.1.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00,- dan Rp0.00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0.-*

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.- dan Rp0.-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp94.982.936.-*

C.1.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp94.982.936.- dan Rp110.154.590.-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	18,582,462	15,671,940
Barang untuk Pemeliharaan	5,575,875	3,372,800
Suku Cadang	-	59,545,850
Bahan Baku	70,824,599	31,564,000
Jumlah	94,982,936	110,154,590

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp0.00

C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00 dan Rp0.-.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0.-

C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0.-

C.1.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Tetap
Rp9.059.701.600.-

C.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing –masing sebesar Rp9.059.701.600.- dan Rp8.747.048.346.- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.

Tanah
Rp2.822.032.000.-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Kendari per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.822.032.000.- dan Rp2.658.822.000.-

Rincian Tanah per 31 Desember 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.213 m2	Jalan Wolter Monginsidi No.82A Ranomeeto Kendari	2,658,822,000
2		Satker Baubau	163,210,000
3			
4			
Jumlah			2,822,032,000

Peralatan dan Mesin

Rp9.340.691.116.-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp9.340.691.116.- dan Rp5.143.827.672.-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	9,340,691,116
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklas Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 30 September 2025	9,340,691,116
Ekstrakontabel Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	9,340,691,116

Terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin dari SKIPM Baubau yang sebagian besar di kirim ke SKIPM Kendari

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Rp6.929.545.661.-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing senilai Rp6.929.545.661.- dan Rp6.929.545.661.-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	6,929,545,661
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Perolehan melalui KDP	-
Jaringan Listrik Gedung dan Bangunan	-
Revaluasi Gedung dan Bangunan	-
Saldo per 31 Desember 2025	6,929,545,661
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6,929,545,661

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp233.705.900.-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp233.705.900.-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	233,705,900
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 30 September 2025	233,705,900
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	-
Nilai Buku per 30 September 2025	233,705,900

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp41.785.000.-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp41.785.000.- dan Rp0.-. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya berupa Monografi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	41,785,000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	41,785,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	41,785,000

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp10.403.231.804.-*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(10.403.231.804.-) dan Rp(9.932.339.049.-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	(8,899,008,666)	(8,899,008,666)
2	Gedung dan Bangunan	0	(1,296,764,035)	(1,296,764,035)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	(207,459,103)	(207,459,103)
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	(10,403,231,804)	(10,403,231,804)

Aset Tak Berwujud Rp0.-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0.- dan Rp0.-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0.-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0.- dan Rp0.-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0.-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0.00 dan Rp0.00,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0.-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp13.057.415.-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.057.415.- dan Rp24.026.914.-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga ini berupa, Pembayaran Listrik, telepon dan internet bulan Desember 2025 yang belum dicatat pada Periode Pelaporan per 31 Desember 2025.

*Pendapatan Diterima di
Muka
Rp0.-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0.-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0.- dan Rp0.00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp9.046.644.185.-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.046.644.185.- dan Rp8.723.021.432.-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp7.301.947.528.-)

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp7.301.947.528.00) dan Rp(4.897.017.-)). Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp9.073.980.- dikurangi beban Rp7.311.021.508.-.

Pendapatan PNB
Rp. 9.073.980.-

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.073.980.- dan Rp155.273.980.-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan penggunaan sarana sesuai dengan	298,980		0.00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	8,775,000	114,115,000	(92.31)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	
Jumlah	9,073,980	114,115,000	(92.05)

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi

Beban Pegawai
Rp4.183.492.417.-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.183.492.417.- dan Rp2.383.427.364.-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji tunjangan PNS	2,026,500,465	1,216,584,195	66.57
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2,015,042,661	1,061,325,169	89.86
Beban Lembur	141,375,000	105,518,000	33.98
Jumlah	4,182,918,126	2,383,427,364	75.50

Beban Persediaan
Rp179.215.058.-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp179.215.058.- dan Rp184.991.869.-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	76,362,033	70,094,899	8.94
Beban Persediaan Bahan Baku	102,853,025	114,896,970	(10.48)
Jumlah	179,215,058	184,991,869	(3.12)

Beban Barang dan Jasa
Rp1.520.699.006.-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.520.699.006.- dan Rp1.003.184.836.-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	125,818,234	141,413,042	(11.03)
Beban Langganan Telepon	11,017,310	16,999,850	(35.19)
Beban Langganan Air	7,447,617	4,703,161	58.35
Beban Sewa	24,000,000	0	0.00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	4,239,090	(100.00)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	0	0.00
Beban Jasa Profesi	0	2,700,000	100.00
Beban Jasa lainnya	427,588,900	246,730,000	73.30
Beban Bahan	16,452,500	87,628,000	(81.22)
Beban Honor Output Kegiatan	89,660,000	34,128,000	162.72
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15,760,000	12,240,000	28.76
Beban Keperluan Perkantoran	635,730,453	317,545,193	100.20
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	44,369,994	38,532,000	15.15
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	13,096,500	12,999,500	0.75
Beban Honor Operasional Satker	4,480,000	2,992,000	49.73
Beban Barang Operasional Lainnya	105,277,498	80,335,000	31.05
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh			0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid	0	0	0.00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0.00
Jumlah	1,520,699,006	1,003,184,836	51.59

Beban Pemeliharaan
Rp838.838.070.-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp838.838.070.- dan Rp544.501.639.-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	545,337,000	223,040,000	144.50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186,468,684	235,603,769	0.00
Beban persediaan untuk pemeliharaan	46,144,536	51,369,270	0.00
Beban persediaan suku cadang	60,887,850	34,488,600	0.00
Jumlah	838,838,070	544,501,639	54.06

Beban Perjalanan Dinas
Rp117.882.284.-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp117.882.284.- dan Rp383.383.442.-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh blokir anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	78,223,900	209,355,712	(62.64)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	19,360,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,658,384	154,667,730	(74.36)
Jumlah	117,882,284	383,383,442	(69.25)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0.-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun KIPM Kendarimeningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial
Rp0.-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya

risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp470.892.755.-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp470.892.755.- dan Rp552.801.714.-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	271,994,281	360,604,879
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	181,398,779	174,659,640
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	17,499,695	17,537,195
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-
Jumlah Penyusutan	470,892,755	552,801,714
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	470,892,755	552,801,714

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0.-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Rp(3.402.324.-)

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(3.402.324.-) dan Rp29.221.000.-. Defisit dari Kegiatan Non operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 September 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	820,000	23,358,000	0.00
Beban Pelepasan aset non lancar	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lancar	820,000	23,358,000	0.00
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	4,222,324	5,863,000	0.00
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(3,402,324)	5,863,000	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(3,402,324)	29,221,000	0.0

*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa Rp0.-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp8.723.021.432.-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.732.021.432.- dan Rp10.349.819.906.-.

Defisit LO
Rp(7.305.349.852.-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(7.305.349.852.-) dan Rp(4.917.809.886.-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp0.00

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0.00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0.-.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0.-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.- dan Rp0.-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain
Rp1.080.-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.080.- dan Rp3.946,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp7.628.971.525.-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.628.971.525.- dan Rp3.291.007.466.-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10,109,978)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,745,706,450
Transfer Masuk	893,375,053
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7,628,971,525

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(8.760.998.-) sedangkan DKEL sebesar Rp4.195.347.900.-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp893.375.053.- terdiri dari transfer masuk dari Sekretariat BKIPM berupa sertifikat mutu dengan nomor BAST nomor: : B.3809/BPPMHKP.1/PL.520/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 dan : B.4324/BPPMHKP.1/PL.520/IX/2025 tanggal 15 September 2025 serta transfer masuk dari BUSKIPM dengan nomor : B.188/BUSKIPM/KI.140/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 Adapun nilai Transfer keluar adalah Rp893.375.053.-

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir

Rp9.046.644.185.-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.046.644.185.-. Dan Rp8.723.021.432.-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Laporan Keuangan Stasiun KIPM Kendari Per 31 Desember TA 2025 BKIPM disajikan berdasarkan hasil Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2. Pada tahun 2025, Stasiun KIPM Kendari Mempunyai anak satker yaitu Stasiun KIPM Bau-bau, hal ini berdasarkan surat keputusan nomor: B. 1503/BPPMHKP.KP/KU.230/XI/2024 Tanggal 31 Dember 2024 terkait Rencana pembentukan organisasi tata laksanakan yang baru lingkup bppmhkp. Stasiun KIPM Baubau mempunyai 24 pegawai terdiri dari 1 kepala stasiun, 9 berstatus ASN, 11 orang berstatus PPPK dan 3 orang PJLP
3. Informasi Rekening Satker

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2025
1	650955676941000	BPG 060 SKIPM KENDARI	0

1. Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan lingkup BPPMHKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp425.380.000.-, dan realisasi senilai Rp254.533.400.- atau 53.84% dari pagu, dengan rincian pada Tabel berikut:

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	98.310.000	67.341.900	68.50	Produk	28	28
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	119.070.000	14.014.500	11.77	Lembaga	3	3
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20.000.000	0	0	Lembaga	10	0
Manajemen Mutu						

Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	146.000.000	138.177.000	94.64	Rekomendasi kebijakan	1	1
Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	25.000.000	100	Lembaga	1	1
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	10.000.000	10.000.000	100	Lembaga	1	1
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0	Produk	1	0
	425.380.000	254.533.400	53.84			

4. Tidak ada Program Tematik APBN di Stasiun KIPM Kendari

5. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Kendari KEP.005/KPA.SKIPM.KDI/ KU.110/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Tim Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Stasiun KIPM Kendari, Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Tamrin,S.Pi,MM	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Yuni Irawati Wijaya,SP,Msi	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Mutaqin Amin Laore,A.Md	Pejabat Penandatanganan SPM
4	Muh. Iqbal AS Wellem	Bendahara Pengeluaran
5	Suharsono	Bendahara Penerimaan dari PPS

LAMPIRAN DAN DAFTAR

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 9:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	191,750	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	959
0.0	117111	Barang Konsumsi	18,582,462	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,575,875	0
0.0	117131	Bahan Baku	70,824,599	0
0.0	131111	Tanah	2,822,032,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,340,691,116	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,929,545,661	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	183,712,000	0
0.0	134113	Jaringan	49,993,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	41,785,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,899,008,666
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,296,764,035
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	183,712,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	23,747,103
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	13,057,415
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,745,706,450
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,109,978	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	893,375,053
0.0	391111	Ekuitas	0	8,723,021,432
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,080
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	820,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	298,980
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	8,775,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,223,929,840	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,328	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	103,492,650	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	34,277,164	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	22,300,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,167,494	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	73,361,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	179,066,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	40,890,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	224,523,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,499	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,304,240	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,578,790	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 9:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13,759,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	51,567,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	16,390,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	117,630,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	23,745,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,711,417,248	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	303,433,663	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	635,730,453	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	44,369,994	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,096,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89,660,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	105,277,498	0
3.0	521211	Beban Bahan	16,452,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,480,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	15,760,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	125,818,234	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	11,017,310	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,447,617	0
3.0	522141	Beban Sewa	24,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	427,588,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	545,337,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186,468,684	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	78,223,900	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,658,384	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	271,994,281	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	181,398,779	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	15,000,000	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,499,695	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	76,362,033	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	46,144,536	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	60,887,850	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	102,853,025	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	959	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4,222,324	0
JUMLAH			26,788,288,173	26,788,288,173

Keterangan :
FINAL

KENDARI, 24 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KASRIDA



KASRIDA

NIP 197705122002122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 24/02/26 6:46 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 9:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

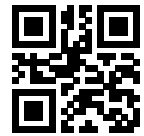
KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,745,706,450
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,109,978	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	820,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	298,980
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	8,775,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	215,998
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,223,929,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,328	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103,492,650	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,277,164	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22,300,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,167,494	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	73,361,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	179,066,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,890,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	224,523,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,599	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,304,240	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,578,790	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,759,800	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	51,567,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	16,390,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	117,630,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	23,745,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,711,555,587	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	303,487,074	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	639,219,543	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44,369,994	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,096,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	89,660,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	105,277,498	0
3.0	521211	Belanja Bahan	16,452,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,480,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,760,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	118,507,851	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	62,157,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 24/02/26 6:46 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 9:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	134,170,043	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	10,145,910	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,447,617	0
3.0	522141	Belanja Sewa	24,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	427,588,900	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	545,337,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186,468,684	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78,223,900	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,658,384	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,100
JUMLAH			6,755,817,528	6,755,817,528

Keterangan :

FINAL

KENDARI, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

ASAT PANGGUNA ANGGARAN



KASRIDA

197705122002122001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 12:40 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,073,980	155,273,980	(146,200,000)	(94.156)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	9,073,980	155,273,980	(146,200,000)	(94.156)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	9,073,980	155,273,980	(146,200,000)	(94.156)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,183,493,376	2,383,427,364	1,800,066,012	75.524
Beban Persediaan	179,215,058	184,991,869	(5,776,811)	(3.123)
Beban Barang dan Jasa	1,520,699,006	1,003,184,836	517,514,170	51.587
Beban Pemeliharaan	838,838,070	544,501,639	294,336,431	54.056
Beban Perjalanan Dinas	117,882,284	383,383,442	(265,501,158)	(69.252)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI
Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 12:40 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	470,892,755	552,801,714	(81,908,959)	(14.817)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	959	1,080	(121)	(11.204)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,311,021,508	5,052,291,944	2,258,729,564	44.707
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,301,947,528)	(4,897,017,964)	(2,404,929,564)	49.11
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	820,000	(27,444,306)	28,264,306	(102.988)
Pendapatan Pelepasan Aset	820,000	24,655,300	(23,835,300)	(96.674)
Beban Pelepasan Aset	0	52,099,606	(52,099,606)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4,222,324)	6,652,384	(10,874,708)	(163.471)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6,652,384	(6,652,384)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,222,324	0	4,222,324	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3,402,324)	(20,791,922)	17,389,598	(83.636)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,305,349,852)	(4,917,809,886)	(2,387,539,966)	48.549
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,305,349,852)	(4,917,809,886)	(2,387,539,966)	48.549

Keterangan :
FINAL

KENDARI, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
JASA PENGGUNA ANGGARAN

KASRIDA
NIP 197705122002122001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 24/02/26 12:48 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:39 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	8,723,021,432	10,349,819,906	(1,626,798,474)	(15.72)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,305,349,852)	(4,917,809,886)	(2,387,539,966)	48.55
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,080	3,946	(2,866)	(72.63)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	1,080	3,946	(2,866)	(72.63)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,628,971,525	3,291,007,466	4,337,964,059	131.81
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	323,622,753	(1,626,798,474)	1,950,421,227	(119.89)
EKUITAS AKHIR	9,046,644,185	8,723,021,432	323,622,753	3.71

Keterangan :

FINAL

KENDARI, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KASRIDA



KASRIDA

NIP 197705122002122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI 567694

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:39 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	192,850,000	10,109,978	(182,740,022)	5.24	120,000,000	186,581,664	66,581,664	155.48
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	192,850,000	10,109,978	(182,740,022)	5.24	120,000,000	186,581,664	66,581,664	155.48
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	192,850,000	10,109,978	(182,740,022)	5.24	120,000,000	186,581,664	66,581,664	155.48
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,113,219,000	6,745,706,450	(367,512,550)	94.83	4,483,555,000	4,358,791,876	(124,763,124)	97.22
1. Belanja Pegawai	4,296,511,000	4,183,685,126	(112,825,874)	97.37	2,469,896,000	2,382,853,978	(87,042,022)	96.48
2. Belanja Barang	2,816,708,000	2,562,021,324	(254,686,676)	90.96	2,013,659,000	1,975,937,898	(37,721,102)	98.13
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI 567694

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:39 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,113,219,000	6,745,706,450	(367,512,550)	94.83	4,483,555,000	4,358,791,876	(124,763,124)	97.22
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KENDARI, 24 Februari 2026

Mengetahui dan Mengetes
KASRIDA
KASRIDA



KASRIDA

NIP 197705122002122001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (567694) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	191,750	215,998	(24,248)	(11.23)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(959)	(1,080)	121	(11.20)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	190,791	214,918	(24,127)	(11.23)
Persediaan	94,982,936	110,154,590	(15,171,654)	(13.77)
JUMLAH ASET LANCAR	95,173,727	110,369,508	(15,195,781)	(13.77)
ASET TETAP				
Tanah	2,822,032,000	2,658,822,000	163,210,000	6.14
Peralatan dan Mesin	9,340,691,116	5,143,827,672	4,196,863,444	81.59
Gedung dan Bangunan	6,929,545,661	6,548,638,877	380,906,784	5.82
Jalan, Irigasi dan Jaringan	233,705,900	233,705,900	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	41,785,000	0	41,785,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,403,231,804)	(5,948,315,611)	(4,454,916,193)	74.89
JUMLAH ASET TETAP	8,964,527,873	8,636,678,838	327,849,035	3.80
JUMLAH ASET	9,059,701,600	8,747,048,346	312,653,254	3.57
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	13,057,415	24,026,914	(10,969,499)	(45.66)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13,057,415	24,026,914	(10,969,499)	(45.66)
JUMLAH KEWAJIBAN	13,057,415	24,026,914	(10,969,499)	(45.66)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	9,046,644,185	8,723,021,432	323,622,753	3.71
JUMLAH EKUITAS	9,046,644,185	8,723,021,432	323,622,753	3.71
JUMLAH EKUITAS	9,046,644,185	8,723,021,432	323,622,753	3.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,059,701,600	8,747,048,346	312,653,254	3.57

Keterangan :

FINAL

KENDARI, 24 Februari 2026

Pemangku Jawab UAKPA

USA PANGGUNA ANGGARAN



KASRIDA

NIP 197705122002122001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (567694) STASIUN KIPM KENDARI
Kode dan Nama UAPPAW : (2000) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Eselon 1 : (13) BPPMHKP
Kode dan Nama K/L : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	✓	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
	a. Pagu/DIPA		✓
	b. Estimasi PNB		✓

	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
			V	
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	N/A	N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak

2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		V	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	V		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		V	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak

2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak

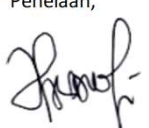
TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

--

Mengetahui Kepada Penyusun LK,   Kasinda NIP.197705122002122001	Kendari, 09 Januari 2026 Penelaah,  Hasnawati H., S.Pd NIP.198206062009122002
--	---

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 26/02/26 12:51 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 8:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7		8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		20	9,900,000	218	35,973,917		0	238	45,873,917
30303	ALAT UKUR	-	0	0	1	715,000		0	1	715,000
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	182	26,026,986		0	182	26,026,986
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	20	9,900,000	10	3,015,000		0	30	12,915,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	17	2,835,652		0	17	2,835,652
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	0	0	5	1,071,279		0	5	1,071,279
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	3	2,310,000		0	3	2,310,000
TOTAL				9,900,000		35,973,917		0		45,873,917

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 26/02/26 12:51 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 8:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,213	2,658,822,000	500	163,210,000	0	0	3,713	2,822,032,000
20101	TANAH PERSIL	-	3,213	2,658,822,000	500	163,210,000	0	0	3,713	2,822,032,000
132111	Peralatan dan Mesin		404	5,143,827,672	570	4,296,057,444	40	99,194,000	934	9,340,691,116
30103	ALAT BANTU	-	1	6,000,000	1	5,000,000	0	0	2	11,000,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	6	401,000,000	7	299,251,125	0	0	13	700,251,125
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	0	0	5	9,624,900	0	0	5	9,624,900
30303	ALAT UKUR	-	2	4,700,000	5	4,303,750	0	0	7	9,003,750
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	0	0	12	99,772,000	0	0	12	99,772,000
30501	ALAT KANTOR	-	30	325,738,000	76	161,691,900	0	0	106	487,429,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	209	846,617,914	221	523,687,400	0	0	430	1,370,305,314
30601	ALAT STUDIO	-	7	47,501,600	10	171,260,000	0	0	17	218,761,600
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	14,865,000	2	7,159,000	0	0	4	22,024,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	382,000,000	0	0	0	0	1	382,000,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	4,950,000	54	213,220,400	40	99,194,000	16	118,976,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	70	2,535,259,200	107	1,967,486,543	0	0	177	4,502,745,743
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	0	0	11	28,992,841	0	0	11	28,992,841
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	0	0	2	272,135,000	0	0	2	272,135,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	3	32,087,000	1	5,354,250	0	0	4	37,441,250
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	2	47,224,000	2	11,597,500	0	0	4	58,821,500
31001	KOMPUTER UNIT	-	31	309,396,758	28	363,023,135	0	0	59	672,419,893
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	32	153,537,800	22	97,778,200	0	0	54	251,316,000
31301	SUMUR	-	1	25,000,000	1	44,544,500	0	0	2	69,544,500
31503	ALAT SAR	-	0	0	2	7,700,000	0	0	2	7,700,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	5	7,950,400	1	2,475,000	0	0	6	10,425,400
133111	Gedung dan Bangunan		8	6,548,638,877	3	380,906,784	0	0	11	6,929,545,661
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	6	6,339,235,320	2	304,378,000	0	0	8	6,643,613,320
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	209,403,557	1	76,528,784	0	0	3	285,932,341
134111	Jalan dan Jembatan		590	183,712,000	0	0	0	0	590	183,712,000
50101	JALAN	-	590	183,712,000	0	0	0	0	590	183,712,000
134113	Jaringan		1	49,993,900	0	0	0	0	1	49,993,900
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	49,993,900	0	0	0	0	1	49,993,900
135121	Aset Tetap Lainnya		0	0	79	41,785,000	0	0	79	41,785,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	0	0	76	37,813,000	0	0	76	37,813,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	0	0	3	3,972,000	0	0	3	3,972,000
TOTAL				14,584,994,449		4,881,959,228		99,194,000		19,367,759,677

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 26/02/26 12:51 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 8:24 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		238	45,873,917	(9,900,000)	(35,953,650)	(45,853,650)	20,267
30303	ALAT UKUR	-	1	715,000	0	(715,000)	(715,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	182	26,026,986	0	(26,026,986)	(26,026,986)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	30	12,915,000	(9,900,000)	(3,015,000)	(12,915,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	17	2,835,652	0	(2,835,652)	(2,835,652)	0
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	5	1,071,279	0	(1,051,012)	(1,051,012)	20,267
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	3	2,310,000	0	(2,310,000)	(2,310,000)	0
JUMLAH			238	45,873,917	(9,900,000)	(35,953,650)	(45,853,650)	20,267

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl Data : 26/02/26 12:51 AM
Tgl Cetak : 26/02/26 8:24 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		3,713	2,822,032,000	0	0	0	2,822,032,000
20101	TANAH PERSIL	-	3,713	2,822,032,000	0	0	0	2,822,032,000
132111	Peralatan dan Mesin		934	9,340,691,116	(4,726,960,061)	(4,172,048,605)	(8,899,008,666)	441,682,450
30103	ALAT BANTU	-	2	11,000,000	(6,000,000)	(5,000,000)	(11,000,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	13	700,251,125	(381,000,000)	(299,251,125)	(680,251,125)	20,000,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	5	9,624,900	0	(9,624,900)	(9,624,900)	0
30303	ALAT UKUR	-	7	9,003,750	(2,350,000)	(5,243,750)	(7,593,750)	1,410,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	12	99,772,000	0	(99,772,000)	(99,772,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	106	487,429,900	(317,521,000)	(169,908,900)	(487,429,900)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	430	1,370,305,314	(839,445,914)	(508,909,150)	(1,348,355,064)	21,950,250
30601	ALAT STUDIO	-	17	218,761,600	(47,185,340)	(171,576,260)	(218,761,600)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	4	22,024,000	(14,865,000)	(7,159,000)	(22,024,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	382,000,000	(362,900,000)	(19,100,000)	(382,000,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	16	118,976,400	(4,950,000)	(114,026,400)	(118,976,400)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	177	4,502,745,743	(2,185,739,563)	(2,052,659,757)	(4,238,399,320)	264,346,423
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	11	28,992,841	0	(22,572,739)	(22,572,739)	6,420,102
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	2	272,135,000	0	(171,281,000)	(171,281,000)	100,854,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	4	37,441,250	(31,856,786)	(5,584,464)	(37,441,250)	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	4	58,821,500	(45,474,000)	(6,072,500)	(51,546,500)	7,275,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	59	672,419,893	(305,784,258)	(351,683,935)	(657,468,193)	14,951,700
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	54	251,316,000	(148,937,800)	(100,130,450)	(249,068,250)	2,247,750
31301	SUMUR	-	2	69,544,500	(25,000,000)	(42,317,275)	(67,317,275)	2,227,225
31503	ALAT SAR	-	2	7,700,000	0	(7,700,000)	(7,700,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	6	10,425,400	(7,950,400)	(2,475,000)	(10,425,400)	0
133111	Gedung dan Bangunan		11	6,929,545,661	(1,031,396,142)	(265,367,893)	(1,296,764,035)	5,632,781,626
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	8	6,643,613,320	(1,002,287,868)	(234,425,007)	(1,236,712,875)	5,406,900,445
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	3	285,932,341	(29,108,274)	(30,942,886)	(60,051,160)	225,881,181
134111	Jalan dan Jembatan		590	183,712,000	(168,712,000)	(15,000,000)	(183,712,000)	0
50101	JALAN	-	590	183,712,000	(168,712,000)	(15,000,000)	(183,712,000)	0
134113	Jaringan		1	49,993,900	(21,247,408)	(2,499,695)	(23,747,103)	26,246,797
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	49,993,900	(21,247,408)	(2,499,695)	(23,747,103)	26,246,797
135121	Aset Tetap Lainnya		79	41,785,000	0	0	0	41,785,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	76	37,813,000	0	0	0	37,813,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	3	3,972,000	0	0	0	3,972,000
JUMLAH			5,328	19,367,759,677	(5,948,315,611)	(4,454,916,193)	(10,403,231,804)	8,964,527,873

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN KENDARI

Tgl.Data : 26/02/26 12:51 AM
Tgl.Cetak : 26/02/26 8:22 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	18,582,462
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,575,875
117131	Bahan Baku	70,824,599
131111	Tanah	2,822,032,000
132111	Peralatan dan Mesin	9,340,691,116
133111	Gedung dan Bangunan	6,929,545,661
134111	Jalan dan Jembatan	183,712,000
134113	Jaringan	49,993,900
135121	Aset Tetap Lainnya	41,785,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,899,008,666)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,296,764,035)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(183,712,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(23,747,103)
J U M L A H		9,059,510,809

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Kementerian/Lembaga/Satker: SKIPM Kendari

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. 31-Des	Sisa Pagu s.d. 30-Sep-2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B – F)
51	4.483.494.000	2.806.944.926	1.676.549.074	1.634.549.074	4.441.494.000	42.000.000
52	3.719.745.000	1.388.402.974	2.331.342.026	789.629.026	2.178.032.000	1.541.713.000
53	0	0	0	0	0	0
57						
Total	8.203.239.000	4.195.347.900	4.007.891.100	2.424.178.100	6.619.526.000	1.583.713.000

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar Rp1.388.402.974,00 (37.33 %). Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan (< 70%) disebabkan oleh blokir efisiensi anggaran dan blokir penggunaan dana PNBK.

2. Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp2.424.178.100,00 dengan rincian sebagai berikut: pembayaran belanja pegawai, *pembayaran honor, langganan daya dan jasa, keperluan perkantoran, kegiatan ISO, gaji PJLP*).). Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp6.619.526.000,00 dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp1.583.713.000,00

a. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Kementerian/Lembaga/Satker: SKIPM Kendari

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 30-Sep-2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D + E)	G (C – F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.248.548.000	2.619.898.554	1.628.649.446	4.248.548.000	40.000.000

5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri					
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara					
5114	Belanja Gaji Dokter PTT					
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS					
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	234.946.000	187.046.442	47.899.558	232.946.000	2.000.000
5121	Belanja Honorarium					
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.902.876.000	1.323.828.672	360.000.000	1.683.828.672	219.047.328

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp219.047.328 Atas pagu minus satker tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan/mengusulkan revisi anggaran antar jenis belanja/satker untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai. (

b. Informasi Pagu Blokir
Kementerian/Lembaga/Satker
:

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	4,483,494,000	0	0	0
2	52	3.719.745.000	1.574.463.000	32.750.000	Oktober 2025
3	53	0	0	0	0
4	dst				

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp1.574.463.000,00. Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp32.750.000,00 sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp1.574.430.250

3. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

a. Informasi *Outstanding* Kontrak
Kementerian/Lembaga/Satker
:

No	Satker	Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
N I H I L					
Total					

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, tidak terdapat kontrak yang masih *outstanding* dengan nilai kontrak sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00

Berdasarkan *outstanding* kontrak tersebut, sebanyak 0 kontrak merupakan *outstanding* kontrak signifikan (*Tingkat signifikansi disesuaikan berdasarkan nilai sisa kontrak terbesar minimal 20 kontrak outstanding atau sesuai jumlah kontrak outstanding untuk K/L dengan jumlah kontrak ≤ 20*) dengan rincian sebagai berikut:

b. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

Kementerian/Lembaga/Satker:

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
NIHIL								

Sumber: Aplikasi OMSPAN

Berdasarkan *outstanding* kontrak signifikan tersebut, sebanyak kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu. *(narasi penjelasan dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)*

4. Informasi Progres Likuidasi K/L pada Kabinet Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengampu Kementerian kelautan dan Perikanan yang dilikuidasi telah melakukan pengalihan aset dan kewajiban dengan ringkasan progres likuidasi sebagai berikut:

a. Progres Likuidasi Berdasarkan Jumlah Satker

Kementerian/Lembaga:

Jumlah satker Terlikuidasi	Selesai Likuidasi	Dalam Proses	% Progres Penyelesaian
NIHIL			

b. Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset dan Kewajiban

Kementerian/Lembaga:

Pos Neraca	Nilai Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Nilai Saldo 31 Desember 2025	Mutasi	% Progres Likuidasi
A	B	C	D (B - C)	E (D / B x 100%)
Aset	NIHIL			
- Aset Lancar				
- Aset Tetap				
- Properti Investasi				
- Piutang Jangka Panjang				
- Aset Lainnya				
Kewajiban				
- Kewajiban Jangka Pendek				
- Kewajiban Jangka Panjang				

Kementerian/Lembaga dapat memberikan informasi tambahan berupa mekanisme penyelesaian likuidasi pada masing masing pos ataupun kendala penyelesaian likuidasi, atau penjelasan lainnya.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Kondisi

Penjelasan informasi mengenai kondisi dapat meliputi reorganisasi, pergantian pimpinan, kepemilikan aset seperti melimpahkan atau menerima aset hasil likuidasi, dan lain sebagainya. Pada SKIPM Kendri terdapat 7 Target Prioritas Nasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp425.380.000,00, dan realisasi senilai Rp254.533.400,00 atau 53.84% dari pagu .

2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Penjelasan informasi mengenai Hal Khusus Menyangkut Program Strategis memuat penjelasan program strategis yang meliputi penjelasan atas target dan capaian secara ringkas. Misalnya Badan Gizi Nasional menjelaskan program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Koperasi menjelaskan program Koperasi Merah Putih, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan program Sekolah Garuda.

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Stasiun KIPM Kendari dengan target Rp.192.850.000, pada Tahun 2025, hanya terrealisasi sebanyak Rp10.109.978 atau sebesar 5.24 % dari target. Realisasi PNBPN ini bersumber dari berasal dari kegiatan layanan pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi. Capaian realisasi ini sangat kecil dibanding dengan targetnya i sampai berakhirnya Triwulan IV.

**MEKANISME DAN FORMAT PENYAJIAN DATA ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN,
TARGET DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN
PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA 31 DESEMBER TAHUN 2025**

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output 31 Desember Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan penyajian data pada lampiran LKKL atas capaian Rincian Output 31 Desember Tahun 2025, setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam *database* RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional 31 Desember Tahun 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses *tagging* secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional 31 Desember Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada penyajian data capaian RO antara lain:
 - a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
 - b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
 - c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan penyajian data capaian RO 31 Desember Tahun 2025 pada Lampiran Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Contoh penyajian data capaian Rincian Output Per Fungsi sebagai berikut:

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN 31 Desember Tahun 2025 pada (*diisi nama Satker/Eselon I/Kementerian/Lembaga*) antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga/Satker : Kementerian Kelautan dan Perikanan/BPPMHKP/Stasiun KIPM Kendari
 Fungsi : Ekonomi
 SubFungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.13. EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
3989.BI A	Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impornya	5.000.000	0	0	1	0	Produk	0	Blokir
3989.P DC	Sertifikasi Produk Produk Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang divalidasi	93.310.000	67.341.900	68.50	28	28	produk	100	
3989.P DF	Sertifikasi Lembaga Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	119.070.000	14.014.500	11.77	3	3	Lemba ga	100	
3989QI C	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20.000.000	0	10	1	0	Lemba ga	0	Blokir
7010									
ABR.00 1	Manajemen Mutu								
DCC.00 1	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.000.000	0	0	1	0	Rekom endasi/ Kebijak an	0	Blokir
PBR.00 1	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.000.000	0	0	1	0	Kegiata n	0	Blokir
PDD.00 1	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang terakreditasi di Laboratorium Acuan dan Penguji Sektor Kelautan Perikanan	146.000.000	138.177.000	1	1	0	Rekom endasi kebijak an	0	
PDD.00 2	Standarisasi Lembaga Unit kerja yang menerapkan Standar Sistem Pengujian Mutu	25.000.000	25.000.000	1	1	0	Lemba ga	35	Buka blokir
QIA.00 1	Unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	10.000.000	10.000.000	1	1	0	Lemba ga	100	
3987	Pengawasan dan Pengendalian Produk Unit/Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan	7.000.000	0	1	0	0	Produk	16	Blokir

3987.E BA	regulasi								
	Program Dukungan Manajemen Manajemen Mutu								
3987.E BD	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	Layanan Umum	40.187.000	39.658.384	98.68	1	0	Layanan	100	
	Layanan Perkantoran	6.580.532.000	6.449.579.766	98.01	2	2	Layanan	74.97	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11.936.00	1.936.000	100	1	1	Dokumen	1008	
	Layanan Manajemen Keuangan	48.184.000.000	0	0	1	0	Dokumen	49.98	Blokir
	Subtotal	7.113.219.000	6.745.706.450						
	Penyesuaian(Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	-	-						
	Total	8.203.239.000	4.195.347.970						

*Keterangan:Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam laporan keuangan

1. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1.Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidas 2.Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi,3.UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,4.Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan,5.Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu,6.Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium,7.Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi prioritas, 7 (Tujuh) kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun KIPM Kendari satuan kerja dengan pagu mencapai Rp. 425.380.000 dan realisasi sebesar Rp 254.533.400 atau 53.34 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga/Satker: Kementerian Kelautan dan Perikanan/BPPMHKP/Stasiun KIPM Kendari:

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	98.310.000	67.341.900	68.50	Produk	28	14	49.98
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	130.000.000	2.280.000	1.75	Lembaga	3	1	74.97
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20.000.000	0	0	Lembaga	10	0	74.97
Manajemen Mutu							
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	95.000.000	24.597.000	40,78	Rekomendasi kebijakan	1	0	4.11
Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	0	1	Lembaga	0	0	49.98
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	10.000.000	0	1	Lembaga	0	0	49.98
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0	Produk	1	0	16.00

